



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KRISIS POLITIK DI MYANMAR PERLU TERUS DIUPAYAKAN SOLUSINYA

Simela Victor Muhamad

Peneliti Utama

simela.muhamad@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Minimnya komitmen Myanmar untuk mengimplementasikan lima butir konsensus ASEAN membuat asosiasi itu kembali mengambil langkah tegas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry, Kamis 3 Februari, mengatakan ASEAN melarang Menlu Myanmar hadir dalam pertemuan menlu-negara anggota ASEAN yang bakal digelar. Pihak Kamboja telah meminta Myanmar untuk mengirim perwakilan nonpolitik sebagai gantinya. Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, juga tidak diundang dalam pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN. Sikap tegas ASEAN itu merupakan teguran langka. Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, menilai teguran tegas itu sangat penting. Ia menilai langkah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN. Ia mengingatkan, selain prinsip tidak turut campur urusan dalam negeri anggota, ASEAN juga sepakat untuk menghormati penegakan hukum, pemerintahan yang konstitusional serta menghormati hak asasi manusia. Selama ini dengan dimotori Indonesia, ASEAN terus berupaya mendorong agar prinsip-prinsip itu tidak hanya disepakati, lebih dari itu, Indonesia ingin agar prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan. Dalam kaitan dengan isu Myanmar, penting bagi ASEAN untuk mendorong negara itu patuh pada kesepakatan bersama.

Sebagai catatan, pada April 2021, dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta – yang juga mengundang Min Aung Hlaing – mereka menyepakati “Lima Butir Konsensus”. Kelima butir kesepakatan itu adalah penghentian segala bentuk kekerasan, penunjukkan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan dialog oleh semua pihak di Myanmar. Hingga sekarang, baru penunjukan utusan khusus yang terwujud.

Di sisi lain, di samping jalur diplomasi resmi, perlu jalur atau upaya lain untuk memperkuat upaya ASEAN. Lembaga itu bisa mendorong AICHR untuk terlibat lebih banyak. Ini artinya, selain mendorong implementasi lima butir kesepakatan itu, perlu membuka ruang lebih luas untuk mendengarkan keluhan kesah warga Myanmar. Sejauh ini yang terpikir adalah menampung keluhan warga, mendengar pengaduan mereka. Materi itu dapat menjadi laporan AICHR kepada ASEAN yang bisa digunakan sebagai basis mengambil langkah atas isu Myanmar. Penting bagi ASEAN untuk lebih melibatkan AICHR serta NGO. Langkah itu dapat membantu Kamboja untuk tetap mengarusutamakan isu Myanmar sebagai agenda penting ASEAN. Salah satu caranya dengan membuka kanal bagi suara-suara dari NGO di ASEAN serta dengan melibatkan AICHR, termasuk dengan menggunakan masukan atau review dari AICHR sebagai pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan di ASEAN terkait Myanmar.

Faktor keketuaan mempunyai pengaruh besar dalam mendorong suatu agenda di ASEAN. Dengan memanfaatkan mekanisme Troika (ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang), Indonesia – Ketua ASEAN pada 2023 – dapat memberi masukan kepada Kamboja. Dengan kondisi internal di ASEAN yang memang sangat berbeda pemahaman dan derajat penerapan demokrasi di internal negaranya, tidak mudah bagi ASEAN untuk menegakkan demokrasi. Namun, di atas semuanya, sebagai komunitas yang berorientasi dan berpusat pada people of ASEAN, menjadi tanggung jawab ASEAN untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia Myanmar dalam prinsip human security. Langkah itu menjadi kian penting, karena isu Myanmar bukan lagi semata-mata persoalan politik regional. Isu Myanmar sudah menyangkut masalah keamanan regional, termasuk pengungsi Myanmar yang bisa merembes lebih jauh bukan hanya ke Thailand, melainkan juga ke Aceh dan Selangor.

Atensi DPR

DPR, melalui Komisi I, perlu mengingatkan pemerintah (melalui Kemenlu) agar Indonesia bersama ASEAN untuk terus mengupayakan solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Sudah setahun lebih krisis politik yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 melanda Myanmar. ASEAN telah berupaya mengupayakan solusi terbaik, terutama dengan menghasilkan lima poin konsensus pada April 2021 di Jakarta. Namun, hingga kini tidak ada kemajuan dalam implementasi lima poin konsensus itu. Penting bagi negara-negara ASEAN lain, terlebih Indonesia yang kerap diposisikan sebagai pemimpin tradisional di kawasan, untuk terus mengawasi dan mengontrol langkah Kamboja. Jangan sampai posisi keketuaan ASEAN dimanfaatkan Kamboja untuk memberi angin kepada Tatmadaw (militer Myanmar). Selain jalur diplomasi resmi, ASEAN juga perlu membuka ruang lebih luas untuk mendengarkan keluhan kesah warga Myanmar. AICHR diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi rakyat Myanmar. Upaya untuk terus mencari solusi atas isu Myanmar, juga perlu dilakukan oleh DPR melalui pelaksanaan peran diplomasi parlemen.

Sumber

Jakarta Post, 7 Februari 2022

Kompas, 4 dan 6 Februari 2022

Media Indonesia, 9 Februari 2022